

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN**

Dalam menilai perkembangan akhir-akhir ini, termasuk dalam mengelola sumberdaya kelautan Indonesia, perlu kita ketahui bahwa potensi kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi sektor yang seharusnya menjadi kekuatan Indonesia di dalam pembangunan ekonomi. Menurut buku *Essential of International Relation* menjelaskan bahwa, kekuatan suatu negara dapat dilihat dari sumberdaya alam yang dimilikinya. Namun sampai saat ini fakta berkata tidak. Oleh karenanya pada bab 2 ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Memberikan gambaran umum potensi sumberdaya kelautan di Indonesia serta menguraikan upaya-upaya Indonesia dan kerjasama internasional sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang diciptakan guna menjawab peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan Indonesia.

#### **A. Gambaran Umum Potensi Sumberdaya Kelautan Indonesia**

Dalam perjuangan bangsa Indonesia yang sulit dan panjang sejak tahun 1957 guna memperoleh pengakuan dunia internasional terhadap kesatuan kewilayahannya. Menurut hukum laut dewasa ini, ada beberapa jenis laut yang perlu mendapat perhatian Indonesia untuk dikelola, baik oleh Indonesia sendiri

maupun bersama negara-negara tetangga, ataupun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan regional dan internasional.

Dalam mengelola sumberdaya kelautan Indonesia, kiranya dapat dibedakan tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia, yaitu: (1) Laut yang merupakan 'Wilayah Indonesia' dan yang berada di bawah 'Kedaulatan Indonesia'; (2) Laut yang merupakan kewenangan Indonesia di mana Indonesia mempunyai 'hak-hak berdaulat', serta (3) Laut yang merupakan 'Kepentingan Indonesia', dimana keterkaitan Indonesia cukup erat walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan kewilayahan atau pun kewenangan dan hak-hak berdaulat atas laut tersebut.<sup>21</sup>

#### 1. **Potensi Kelautan Indonesia<sup>22</sup>**

Adapun potensi kelautan Indonesia sebagai berikut: *Pertama* adalah 'Potensi Fisik',

*"Dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia..." (R.Raharjo).*

Inilah salah satu lagu wajib bangsa Indonesia yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lirik yang sederhana namun memiliki makna yang esensial berdasarkan fakta yang autentik. Indonesia terletak di antara 6° LU hingga 11° LS, dan dari 95° BT hingga 141° BT. Dapat dikatakan sangat strategis secara geografis, karena Indonesia menjadi penghubung

---

<sup>21</sup> Op cit.

<sup>22</sup> Dahuri, Rokhmin. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : LISPI, 2000.

dua samudera dan dua benua, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.110 pulau) dengan garis pantai terpanjang ke-4 di dunia dengan 95.181 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,3 juta Km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,8 juta Km<sup>2</sup>.

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 juta Km<sup>2</sup> pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Oleh karenanya luas total perairan Indonesia yakni 5,8 juta Km<sup>2</sup>. Artinya luas wilayah perairan Indonesia tiga kali lebih luas daripada luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta Km<sup>2</sup>.<sup>23</sup> Sungguh banyak potensi yang dianugerahkan terhadap Indonesia dengan wilayah laut yang begitu luas.

*Kedua* adalah 'Potensi Pembangunan', Potensi Wilayah laut pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sumberdaya yang dapat diperbahruai seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), hutan *mangrove*, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulau-pulau kecil,
- b. Sumberdaya yang tidak dapat diperbahruai seperti; minyak bumi dan gas, bahan tambang dan mineral lainnya serta harta karun,

---

<sup>23</sup> Dayan. La Ode: *Tindak Lanjut Atas Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Kertas Karya Perorangan, Kursus Regular Angkatan XXVIII Lemhanas, 1985. Hal.5.

- c. Energi Kelautan seperti; pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion),
- d. Jasa-jasa lingkungan seperti; pariwisata, perhubungan dan kepelabuhanan serta penampung (penetralisir) limbah.

*Ketiga* adalah 'Potensi Kekayaan Laut', Dalam mengelola kekayaan laut Indonesia, perlu kiranya dipahami hakekat dari kekayaan-kekayaan laut Indonesia yang beragam yang sangat menonjol dan banyak dibicarakan pada waktu ini adalah kekayaan laut hayati atau perikanan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, baik kekayaan ikan yang dieksploitasi oleh nelayan-nelayan tradisional maupun oleh perusahaan-perusahaan perikanan besar. Pengelolaan perikanan akhir-akhir ini menjadi sangat menonjol tidak saja karena potensinya yang besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, tetapi juga karena banyaknya pencurian ikan di laut serta cara penangkapannya yang tidak berkelanjutan.<sup>24</sup>

Walaupun sumber perikanan Indonesia cukup besar, namun karena hakekatnya yang di beberapa tempat cukup sensitif terhadap over-eksploitasi dan pencurian, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan berbagai ketentuan regional dan internasional. Kekayaan alam yang lainnya adalah dalam bentuk mineral baik mineral cair seperti migas, maupun mineral keras seperti nikel, tembaga, timah, dll.

Kekayaan laut di Indonesia lainnya yang juga sangat penting adalah ruang udara dan ruang laut Indonesia yang sangat luas yang sangat berpotensi untuk

---

<sup>24</sup> <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/SMA%202008.pdf>. Diakses 25 Oktober 2010.

mengembangkan perkapalan dan perhubungan udara, pariwisata, dan sebagai sarana bagi pemersatu bangsa dan negara.

Pemanfaatan ruang laut Indonesia bagi perkapalan akhir-akhir ini banyak menemui kesulitan-kesulitan terutama karena semakin banyaknya transportasi antar pulau Indonesia yang mempergunakan kapal-kapal berbendera asing, dan hampir seluruh barang-barang ekspor impor Indonesia dibawa oleh kapal-kapal berbendera asing.

Di sisi lain, pemanfaatan ruang laut untuk pariwisata menunjukkan harapan-harapan yang besar, tetapi akhir-akhir ini harapan-harapan tersebut agak terganggu karena kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan laut, baik karena pencemaran maupun karena kerusakan terumbu-terumbu karang.

Laut-laut di Indonesia mengandung banyak laut dan selat-selat yang sangat vital dan strategis bagi komunikasi antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang tidak saja penting bagi kapal-kapal dagang, tetapi juga bagi kapal-kapal perang, termasuk kapal selam. Karena itu, ruang laut dan udara Indonesia mempunyai nilai yang sangat strategis, bukan saja bagi Indonesia, tetapi terutama lagi bagi negara-negara maritim dan negara-negara besar lainnya, khususnya Amerika Serikat, Jepang, RRC, Australia, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Indonesia harus lebih mampu memelihara dan memanfaatkan posisi strategis ini untuk meningkatkan keamanannya dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan negaranya. Disamping hal-hal di atas laut-laut Indonesia yang sepanjang sejarahnya selama ribuan tahun ramai dilayari oleh kapal-kapal,

---

<sup>25</sup> Dahuri, Rokhmin. *Perjuangan Anak Nelayan : Membangun Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Bening, 2004.

termasuk kapal-kapal asing, mengandung ribuan benda-benda atau kapal-kapal yang mempunyai nilai-nilai historis, arkeologis, ataupun harta karun. Prospek pengelolaan benda-benda berharga ini di dasar-dasar laut Indonesia belum banyak diselidiki, apalagi dimanfaatkan, dan karena itu masih sangat besar kemungkinannya untuk dikembangkan di masa depan.

Akhirnya perlu dicatat bahwa laut-laut Indonesia adalah laut tropis yang sangat luas dan yang sangat kaya dengan *biodiversity* (keanekaragaman hayati). Laut-laut Indonesia yang terletak di tengah-tengah *Indo Pacific region* adalah yang paling kaya dengan *biodiversity* dibandingkan dengan laut-laut lainnya di seluruh dunia. Indonesia mengandung 1/8 dari *coral reefs* di seluruh dunia yang tercermin dari 85.000 km<sup>2</sup> *coral reefs* di Indonesia yang mengandung paling kurang 2.500 *species reef fish* dan 400 *species stony corals*, walupun banyak dari kekayaan alam ini yang telah rusak. Indonesia masih perlu memelihara, mempelajari dan memikirkan bagaimana memanfaatkan kekayaan *biodiversity* ini untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya.<sup>26</sup>

*Keempat* adalah 'Potensi Geopolitis', Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negara-negara maju, posisi geopolitis yang strategi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya pada beberapa selat yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan

---

<sup>26</sup> Ibid.

Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.<sup>27</sup>

*Kelima* adalah 'Potensi Sumberdaya Manusia', Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi sumberdaya manusia adalah sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti; perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Potensi penduduk berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.<sup>28</sup>

## 2. Potensi Kelautan Maluku<sup>29</sup>

Salah satu alasan mengapa penulis mendeskripsikan kondisi potensi kelautan Maluku pada bab ini, karena penulis meyakini bahwa sub bahasan ini merupakan bagian dari penjabaran terhadap kondisi potensi laut Indonesia secara umum. Hanya saja bahasan ini cakupannya hanya pada kelautan Maluku saja dan akan menjadi objek penelitian penulis pada bab selanjutnya yang akan mengangkat kepentingan Indonesia terhadap Australia dalam kerjasama di bidang kelautan dan perikanan guna memanfaatkan potensi laut yang ada di Maluku, yang dewasa ini menjadi target pencapaian misi kelautan Indonesia untuk pembangunan ekonomi kawasan Indonesia Timur melalui sarana kelautan sebagai sumber utama bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Maluku yang dijuluki oleh dunia internasional sebagai *the spice islands'* *exotic marine paradise* dengan kekayaan rempah-rempah dan potensi kelautan

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Budut W. Andibya, *Maluku: The Wonderful Islands*. (Jakarta: Gibon Books, 2008).

yang berlimpah rupa menjadi lirikan bagi seluruh kawasan nusantara untuk dijadikan peluang yang bermanfaat dalam sektor perekonomian.

Maluku yang pernah dinamakan sebagai “Jazirah Al-Mamlakatul Mulukiyah” oleh bangsa arab kini menjadi sebutan *the blessing and the wonderful islands*, pulau yang diberkahi dengan luas wilayah sekitar 712.480 Km<sup>2</sup>, yang sebagian besar (92,4%) wilayahnya adalah berupa lautan dan hanya 7,6% daratan. Berdasarkan peneropongan citra satelit, provinsi Maluku kini memiliki seribuan pulau dengan luas daratan 54.185 Km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai berkisar 11.000 Km<sup>2</sup>. Luas lautnya mencapai 658.295 Km<sup>2</sup>.

Sebuah provinsi kepulauan yang secara geografis berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara (sebelah utara), Provinsi Papua Barat (sebelah timur), Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah (sebelah barat), serta Negara Timor Leste dan Australia (sebelah selatan). Sebuah provinsi seribu pulau yang secara astronomis membentang antara 2°30’-9° Lintang Selatan dan 124° - 136° Bujur Timur.

Kini Maluku menjadi pulau yang sangat potensial dengan kekayaan alam hayati maupun non-hayati yang dimilikinya. Seharusnya pemerintah memiliki kebijakan dalam memanfaatkan serta memberdayakan potensi yang ada untuk dijadikan potensi yang mendukung sektor perekonomian dan pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah. Peluang dan tantangan pengelolaan kelautan, serta upaya-upaya pemerintah harus ditangani secara serius demi pembangunan nasional yang kuat dan mandiri.

Wilayah Maluku terdiri dari gugusan pulau. Pulau yang terpencar-pencar yang dihubungkan dengan selat dan laut. Dan kekayaan laut yang ada mampu memberikan manfaat dan nafas kehidupan (mata pencarian) sejak lama oleh masyarakat Maluku.

Laut dan perairan Maluku yang kaya raya dengan memiliki potensi ikan yang begitu besar. Potensi sumber daya ikan di laut Maluku mencapai 1,64 juta ton per tahun atau 26,3 % dari potensi nasional yang 6,7 juta ton per tahun. Potensi sumber daya ikan berada pada 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni di laut Banda, laut Seram, dan laut Arafura. Hasil estimasi potensi dan penyebaran beberapa komoditas perikanan terkini menunjukkan bahwa berbagai jenis ikan dengan nilai tambah ekonomis yang tinggi, tersebar di semua wilayah perairan Maluku. Potensi ikan itu mulai dari pelagis, demersal, udang hingga ikan karang.

Ikan-ikan yang menjadi tangkapan para nelayan, di antaranya, adalah ikan Pelagis yang hidup di permukaan hingga kedalaman 200 meter. Ikan-ikan itu biasanya hidup berkelompok dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan ukurannya, ikan Pelagis Besar dan Pelagis Kecil. Pelagis Besar seperti kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*). Sementara itu, Pelagis Kecil di antaranya adalah ikan Selar (*selaroides Leptolepis*) dan Sunglir (*Elasgatis Bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stelophorus Indicus*), Japuh (*Dussumeira spp*), Tembang (*Sadinella Fimbrata*) dan Lemuru (*Sardinella Longiceps*).

Bila menyelam lebih dalam, akan banyak ditemui ikan Demersal. Ikan Demersal adalah ikan yang umumnya hidup di dekat dasar lautan. Ikan Demersal terbagi dalam beberapa jenis dan ukuran. Misalnya, yang termasuk ikan Demersal Besar, adalah jenis Kerapu. Yang tidak kalah menarik adalah ikan Rajabau yang memiliki bentuk tubuh yang unik dan warna yang cantik. Ikan yang hidup di laut yang berair bening itu tidak bisa jauh dari rumah tinggalnya, yakni terumbu karang dengan banyak lorong persembunyiannya.

Pola perikanan tangkap itu sendiri terbagi dua kelompok. *Pertama*, perikanan tangkap yang memburu ikan. Pola ini selalu mencari, mengejar gerombolan atau memburu keberadaannya ikan. Jenis alat tangkap yang dipakai biasanya adalah rawai tuna, jarring insang (tetap, hanyut), dogol dan pancing. Kadang-kadang pancing dilengkapi rumpon. Penangkapan ikan jenis ini umumnya beroperasi di laut lepas dan jauh dari pesisir pantai. *Kedua*, perikanan tangkap yang menetap. Pola ini lokasinya tetap, menunggu gerombolan ikan mendatangi alat yang dipasang. Sebagai alat penarik ikan biasanya adalah cahaya listrik atau petromak. Dalam menangkap ikan, para nelayan menggunakan alat yang di namakan bagan, baik bagan tancap maupun apung dengan bantuan petromak. Pola perikanan tangkap tadi juga dilakukan di perairan umum (sungai).

Untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah provinsi Maluku membaginya dalam 16 wilayah pengembangan perikanan. Masing-masing adalah: Waisala, Seram Utara, Amahai, Salahutu, Seram Timur, Namlea, Waiapo, Buru (Utara, Selatan, dan Barat), Kei Kecil, Pulau-pulau Aru, Kei Besar, Gugus Pulau Terselatan, Gugus Pulau Leti, Moalakor, Gugus Pulau Babar dan

Gugus Pulau Tanimbar. Untuk menunjang ekonomi berbasis kelautan dan perikanan itu sendiri sudah tersedia cukup banyak pelabuhan perikanan. Di antaranya, Pelabuhan Peikanan Nusantara (PPN), di Ambon dan Tual, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Amahai, Eri (Ambon), Taar (Tual), Kayeli (Buru), Ukurlarang (Saumlaki), Klishatu (Wetar), dan Kalar-kalar Dobo. Selain itu, ada tiga unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Dobo, Tamher Timur dan Pelita Jaya.<sup>30</sup>

Selain pola perikanan tangkap, Maluku juga mengembangkan budidaya. Budidaya perikanan dapat dilakukan di air payau (tambak, budidaya air payau), kolam, laut, jaring apung, keramba, dan sawah. Potensi lahan budidaya perikanan yang dapat dipakai mencapai 1,1 juta hektar. Budidaya perikanan yang cukup berkembang, antara lain pertambakan dan kolam di Maluku Tengah dan Pulau Buru. Untuk budidaya laut yang terbesar dilakukan di Maluku Tengah dan Seram.

Yang disebut terakhir, budidaya laut di Pulau Seram, terbilang sudah cukup luas. Mencapai ribuan hektar. Berada di Seram Barat dan Bula. Di Pulau Seram budidaya perikanan sudah beragam. Selain budidaya laut juga kolam, tambak, telaga, rawa, dan sungai. Lahan budidaya kolam terdapat di Kairatu dan Seram Utara., budidaya tambak (Seram Utara), telaga (Taniwei dan Seram Utara), Rawa (Seram Timur, Seram barat, Seram Utara dan Bula), dan penangkapan ikan perairan umum (sungai) ada di Seram Timur, Amahai, Seram Utara dan Bula.

Beberapa wilayah di Maluku yang potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, selain Pulau Seram, juga Ambon serta kepulauan Kai dan

---

<sup>30</sup> Des Alwi. *Sejarah Maluku (Banda, Naire, Ternate, Tidore, dan Ambon)*. Jakarta : Dian Rakyat, 2005.

kepulauan Aru. Pulau Ambon yang dikelilingi oleh 3 Teluk (Teluk Ambon Dalam, Teluk Ambon Luar dan Teluk Baguala) memiliki potensi bagi dikembangkannya perikanan budidaya, terutama budidaya laut. Sedangkan di kawasan Kepulauan Kai dan Kepulauan Aru, memiliki potensi budidaya laut seperti budidaya kerang mutiara.

Laut dan perairan terbukti mampu memberi kehidupan bagi banyak warga Maluku. Mereka pun semakin sadar bahwa laut merupakan lahan mata pencaharian mereka. Oleh sebab itu, usaha di bidang perikanan dalam skala rumah tangga (RTP) terus meningkatkan dan coba terus ditingkatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Pada tahun 2005, jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang perikanan mencapai 37.434 rumah tangga, kemudian meningkatkan menjadi 37.483 rumah tangga (2006). Sebagian besar adalah mereka yang berada di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara Barat.

Karena struktur alam yang cukup mendukung. Hutan *mangrove*, padang lamun, dan terumbu karang tumbuh subur di pesisir pantai. Ketiga habitat pesisir laut tersebar di seluruh perairan Maluku, seperti Pulau Seram, Kepulauan Kei dan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Pulau Buru. Terumbu karang misalnya, adalah habitat laut yang produktif. Dari sudut ekologi, terumbu karang adalah tempat tinggal serta lokasi mencari makan ikan karang dan berbagai biota laut lainnya. Sebuah studi menggambarkan, terumbu karang yang sehat mampu menghasilkan 3-10 ton ikan per Km<sup>2</sup> setiap tahunnya. Dan, terumbu karang laut Maluku teramat sehat dan natural. Sedikitnya terdapat 738 spesies ikan laut hidup di terumbu karang pesisir laut Maluku. Dari 132 jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi di

Indonesia, 32 jenis di antaranya adalah ikan yang hidup di terumbu karang. Ikan tersebut menjadi komoditi ekspor ikan yang utama.

Keindahan terumbu karang Maluku sesungguhnya juga dapat digunakan sebagai tujuan wisata bahari bawah air yang menakjubkan. Saat ini, seiring dengan meningkatnya wisatawan ke Maluku dengan tujuan utama kawasan laut, masyarakat di sekitar terumbu karang memanfaatkannya dengan mendirikan pusat-pusat penyelaman, restoran dan penginapan. Yang pasti, terumbu karang Maluku yang luas memberi kontribusi berharga bagi kekayaan terumbu karang di Indonesia yang kini tinggal 6 juta hektar. Sejauh ini, tercatat sekitar 354 jenis terumbu karang yang terdiri dari 75 marga yang hidup di perairan Maluku. Keindahan terumbu karang yang tidak bisa tergantikan oleh apapun itu merupakan hasil dari proses pembentukan alam yang telah berumur 450 juta tahun lampau.

Pulau Seram adalah wilayah yang dikelilingi terumbu karang. Kawasan pulau ini menjadi tempat tinggal beraneka habitat ikan, termasuk hewan laut lainnya, seperti lumba-lumba. Di pulau Seram, terumbu karang tersebar di berbagai tempat seperti halnya di Kepulauan Banda, Saparua, dan Nusalaut. Di Banda misalnya, yang tersohor dengan tiga pulau besarnya (Neire, Banda Besar dan Gunung Api) memiliki terumbu karang seluas 15 hektar. Kawasan Banda menjadi salah satu tujuan wisata yang disukai wisatawan dan pendatang mancanegara sejak dulu, di antaranya, lantaran keindahan terumbu karangnya.

Yang tidak kalah menarik ialah *mangrove* atau hutan bakau. Dalam hal ini, Maluku memiliki *mangrove* yang sangat luas. Mencapai 100.000-an hektar lebih. *Mangrove* adalah penyangga utama ekosistem lautan dengan daratan. Hutan

bakau ibarat benteng hijau di sepanjang pantai Maluku. Tumbuh sejajar mengikuti garis pantai sehingga mampu berfungsi sebagai penjaga daratan dari hempasan ombak. *Mangrove* berfungsi melindungi pantai dari abrasi. Ada beberapa spesies bakau yang ada. Di Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru dijumpai beberapa spesies bakau, di antaranya, *Rhizophora Mucronata*, *A. Floridum* dan *Ceriops Tagal*. Sedangkan di Pulau Yamdena (Maluku Tenggara) di dominasi oleh bakau jenis *Rhizophora* dan *Brugueira*, Pulau Wetar (*Sonertia Alb*, *Barringtonia Asiatica*, *Hibiscus Tilianceaus*, *Nypha Fructican*, *Acanthus Licifolius*) dan Pulau Larat (*Rhizophora Stylosa*, *Bruguiera Gymnorrhiza*, *Rhizophora Apiculata*).

Yang jelas, hutan bakau memegang peran penting dalam mendukung produktivitas di laut. Kondisi hutan bakau yang berlumpur juga dan pengaruh air pasang surut yang tenang membuatnya cukup tepat sebagai tempat persemaian (perkawinan) berbagai jenis laut. Meski agak seram dengan pepohonan yang rimbun, namun hutan bakau adalah kekayaan alam yang tak bisa dibiarkan punah. Di hutan bakau itulah, semacam mata rantai makanan bekerja. Jika di antara penghuninya punah, maka punahlah semuanya. Karena, di hutan bakau itu terdapat berbagai kehidupan fauna darat seperti mamalia, reptilia, burung dan serangga.

Padang lamun merupakan salah satu komunitas tanaman khas di pesisir laut daerah tropis. Habitat yang sangat produktif dalam menyuburkan perairan. Padang lamun menjadi tempat berteduh dan persediaan makanan bagi berbagai jenis ikan, krustacea, moluska, dan ekodermata yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Lamun tumbuh di perairan yang terlindung, tenang dan berair bersih.

Komunitas lamun di Maluku membentang ke arah lautan yang menyatu dengan komunitas karang; dan ke arah daratan menyatu dengan komunitas *mangrove*. Padang lamun terbesar berada di Seram Timur, Seram Utara, Seram Barat, Bula, Pulau Gorom, dan Huamual belakang.

Masih ada kekayaan lain yang juga sudah lama memberi berkah bagi masyarakat Maluku, yaitu kerang. Sejak lama masyarakat Maluku membuat kulit kerang sebagai bahan baku aneka hiasan. Kulit kerang diukir, misalnya, dijadikan hiasan dinding. Kreasi pembuatan hiasan kerang yang unik tidak hanya dijual, tapi juga sebagai sebuah tradisi. Ini seperti ditulis oleh Rumphius<sup>31</sup> yang mencatat aneka kerang dan siput dalam buku Kotak Keajaiban Pulau Ambon.

Jenis kerang yang paling banyak digunakan untuk kerajinan adalah kerang simping (*Amusium Oleuronectes* dan *Placuna Placenta*). Bentuk kedua jenis kerang tersebut hampir sama, sepasang cangkanya bundar tipis, halus dan mengkilap. Hidupnya di perairan pantai berlumpur. Karena keunikannya, permintaan terhadap kerajinan kulit kerang terus berdatangan. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga dari luar negeri (Australia, Belanda, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Malaysia).

Perairan Maluku memang surga kerang. Setidaknya terdapat 77 jenis kerang berada di laut Maluku. Salah satu jenis kerang yang paling banyak dicari adalah *Pinctada Maxima* yakni kerang yang memiliki cangkang berwarna kuning emas dan mengkilap bagian dalamnya. Dengan diameter sekitar 20 cm, kerang ini merupakan penghasil mutiara yang bernilai ekonomis tinggi. Perhiasan para

---

<sup>31</sup> *Rumphius*, seorang peneliti asal Belanda yang meneliti tentang kerang dan siput yang diterbitkan dalam bentuk naskah tulisan (manuskrip) di Delf, Belanda. Ia wafat dalam usia 74 tahun di Ambon (1628-1702).

bangsawan di berbagai belahan dunia pada umumnya memakai batu mutiara yang dihasilkan kerang ini. Jenis kerang mutiara ini lain yang juga menjadi rebutan adalah kerang hitam (*Pinctada Margaritifera*). Sepasang cangkang bagian dalamnya berwarna putih kehitam-hitaman dengan diameter sekitar 13 cm. meski terlihat hitam, tapi kerang ini memancarkan aura yang sangat indah.

Sebagai kelanjutan dari “tradisi kerang”, kini banyak toko di Maluku yang menjajakan dan menjual kerajinan kerang. Model, bentuk dan fungsinya sudah banyak dan beragam. Mulai dari untuk kap lampu, pigura hingga tempat tisu. Karena itu, pembudidaya kerang dan penjual barang kerajinan di Maluku bak dua tangan yang saling menopang. Dan, produk kerajinan kerang memang cukup menggiurkan. Sebelum konflik social meledak, misalnya, produksi kerajinan kerang mencapai US\$2,8 juta. Bahkan, dalam beberapa tahun belakangan, pasar kerajinan kerang tetap terang mencapai angka rata-rata US\$3,2 juta per tahun. Kerang merupakan salah satu berkah yang sangat potensial bagi Maluku.

Gambaran umum tentang kondisi kelautan Maluku di atas membuktikan bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kebijakan yang nyata dalam mengolah pemanfaatan potensi kelautan Maluku serta meningkatkan pengawasan wilayah laut Maluku khususnya dan wilayah laut Indonesia pada umumnya agar mencegah dari praktek-praktek yang melanggar hukum atau regulasi (yuridis) yang tengah berlaku saat ini, seperti melakukan praktek *illegal fishing*, *illegal trade*, *sea piracy*, dan praktek yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga kesatuan wilayah negaranya sendiri? Kalau bukan bangsanya sendiri!.

## **B. Upaya Indonesia dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan**

### **1. Kondisi Umum<sup>32</sup>**

Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir yang sangat luas. Indonesia memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi *prime mover* pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.

Keunggulan komparatif nasional yakni memiliki laut yang sangat luas dengan berbagai ragam kekayaan alam laut yang berlimpah; dikelilingi oleh negeri-negeri konsumen kekayaan alam laut dan darat Indonesia yang beragam dan berlimpah; dan memiliki budaya bahari yang cukup legendaris.

Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya laut dan pesisir bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh pemerintah untuk pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Hal ini dilakukan untuk menormalisasikan kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat (*resource-based development*), dimana sumberdaya pesisir dan lautan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional, disamping sumberdaya alam di darat.

---

<sup>32</sup> Buku Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kelautan 2010-2014.

Agar pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, termasuk dunia usaha.

Sumber daya kelautan Indonesia yang terdiri dari pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer persegi ( $\text{Km}^2$ ), yang terdiri dari 2,3 juta  $\text{Km}^2$  perairan kepulauan, 0,8 juta  $\text{Km}^2$  perairan teritorial, dan 2,7  $\text{Km}^2$  perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 17.504 pulau dan panjang pantai 95.181  $\text{Km}^2$ , dan letaknya yang strategis di antara 2 benua dan menjadi jalur perdagangan dunia yang penting, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic*, menjadi sangat penting perannya dalam pembangunan nasional.

Ekosistem laut juga sangat berperan penting dalam siklus hidrologi dan keseimbangan alam yang dapat mempengaruhi iklim global. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai pendukung sistem kehidupan. Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing)* maka

peningkatan pengawasan dan keamanan maritim menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kelautan nasional.

Sampai dengan tahun 2008, upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 25 kapal pengawas, operasi bersama, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.369 kelompok masyarakat pengawas. Dalam periode 2004 – 2008 jumlah tindak pidana perikanan menurun dari 174 kasus pada 2004 menjadi 62 kasus pada 2008.

Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayati terumbu karang terbesar di dunia. Dengan luas total sebesar 50.875 km<sup>2</sup> (*World Resources Institute, 2002*), sekitar 51% terumbu karang di kawasan Asia Tenggara dan 18% terumbu karang di dunia, berada di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas ekosistem perairan agar dapat mempertahankan fungsi terumbu karang secara optimal dalam mendukung sistem kehidupan.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan selama kurun waktu 2005-2009 telah dilakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) Pengelolaan kawasan konservasi laut seluas 13,5 juta hektar, termasuk Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); dan (ii) Dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi.

Dalam kurun waktu tersebut, upaya peningkatan kerjasama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut juga telah dilakukan melalui: (i) Pengembangan kerjasama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* dan *Bismarck - South Solomon Marine Ecoregion (BSSME)*, *Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*, serta inisiasi *Coral Triangle Initiative (CTI)* yang melibatkan enam negara dalam rangka pelestarian ekosistem terumbu karang di daerah utara dan timur Indonesia dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut; (ii) Pengembangan kerja sama regional antar wilayah laut di Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain; dan (iii) Pengkajian dan pemacuan stok ikan.

Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang persetujuan pelaksanaan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang berwilayah terbatas dan persediaan ikan yang berwilayah jauh. Undang-Undang ini selanjutnya dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya peran pelestarian sumber daya kelautan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi negara penggagas penyelenggaraan *World Ocean Conference 2009* yang menghasilkan *Manado Ocean Declaration* yang disepakati oleh 76 negara untuk memasukkan isu kelautan ke dalam agenda UNFCCC. Dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya pengelolaan secara terpadu dengan

menerapkan ICM (*integrated coastal management*), pengesahan produk peraturan perundangan antara lain Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kerjasama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antar daerah, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan atau terluar, serta pengembangan sumber daya kelautan non konvensional.

Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan atau terluar, pada kurun waktu 2005-2008 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Selain itu, telah dilakukan identifikasi, verifikasi, penamaan pulau dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terutama pulau terluar melalui pemberian sarana dan prasarana dasar serta pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pulau yang telah diverifikasi mencapai sebanyak 10.160 pulau. Pada tahun 2007 telah didaftarkan untuk pertama kalinya sejumlah 4.891 pulau ke PBB melalui *United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)*.

Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan pemerintah juga telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. Pada tahun 2005 telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup 206 kabupaten/kota, pada tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing mencakup 140 kab/kota, 156 kab/kota, dan 115 kab/kota. Pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut antara lain ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan *Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)*, yang

sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 225 SPDN yang tersebar di 136 kabupaten/kota, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimasi penangkapan, pelelangan, penanganan ikan serta optimasi 4.380 Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Selanjutnya, pengembangan sumber daya kelautan non konvensional telah dilakukan melalui pengelolaan barang muatan kapal tenggelam (BMKT), pariwisata bahari, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber biotek kelautan, serta pemanfaatan energi laut. Selain untuk mendukung upaya pelestarian, pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia, BMKT juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Sampai saat ini BMKT yang telah diangkat mencapai 34.793 unit benda berharga.

## 2. Masalah yang dihadapi Indonesia<sup>33</sup>

Berikut beberapa masalah yang dihadapi Indonesia dalam upaya pengelolaan sumberdaya kelautan:

*Pertama* adalah masalah penetapan batas maritim Indonesia. Masalah tersebut dapat mencakup kebijaksanaan nasional, bilateral atau regional, maupun internasional. Dalam konteks nasional, Indonesia masih perlu menetapkan Perairan Pedalamannya di dalam Perairan Nusantara melalui apa yang oleh Konvensi Hukum Laut 1982 telah sebutkan sebagai '*closing lines*'. Sampai sekarang, seperti disebutkan di atas, Indonesia belum menetapkan Perairan

---

<sup>33</sup> [http://www.ropeg.dkp.go.id/upload/renbang/ujindinas/BAB X Narasi-1.pdf](http://www.ropeg.dkp.go.id/upload/renbang/ujindinas/BAB_X_Narasi-1.pdf). Diakses 25 Oktober 2010.

Pedalaman tersebut. PP No. 38/2002 tanggal 28 Juni 2002 menetapkan dalam pasal 12 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai penetapan Perairan Pedalaman tersebut akan diatur lebih lanjut dalam PP tersendiri. Indonesia baru saja menetapkan 183 titik-titik pangkal sebagai basis menarik garis-garis pangkal atau garis-garis dasar bagi Perairan Nusantaranya, dan penetapan tersebut (PP.No. 38/2002) masih harus disampaikan ke Sekretariat PBB di New York; sekaligus dengan batas Laut Wilayah 12 mil dari garis-garis pangkal tersebut.

Indonesia belum menetapkan Zona tambahannya di luar 12 mil, Laut Wilayah, dan karena itu masih harus menetapkan ketentuan perundang-undangan untuk Zona tambahan ini. Walaupun Indonesia telah mengumumkan dan mengundang ZEE nya seluas 200 mil dari garis-garis pangkal, maka dengan penentuan garis-garis pangkal yang baru tentunya mungkin ada perubahan pula dari koordinat titik terluar ZEE Indonesia tersebut.

Dalam konteks bilateral dan regional, masih banyak garis batas yang belum ditetapkan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangganya yang berkaitan dengan berbagai kawasan laut tersebut di atas.

*Kedua* adalah masalah dalam pemanfaatan laut. Dalam memanfaatkan potensi laut diperlukan berbagai penelitian ilmiah kelautan, usaha-usaha *prospecting* dan eksplorasi tentang jenis, jumlah, komersiabilitas, dan eksploitasibilitas dari suatu kekayaan alam di laut. Untuk itu diperlukan suatu program yang jelas di bidang penelitian serta langkah-langkah pemanfaatan selanjutnya bagi keperluan rakyat dan negara di berbagai kawasan laut.

Seperti dikemukakan di atas, beberapa pemanfaatan kekayaan laut terlihat masih belum maksimal, walaupun sebagian kelihatan sudah cukup intensif. Migas misalnya kelihatan sudah sangat menyumbang bagi pendapatan negara. Tetapi pemanfaatan sumber perikanan masih banyak terdapat kerancuan dan masih banyak yang dapat diusahakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan negara.

Di bidang perhubungan laut terlihat bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia dan awak-awak kapal Indonesia terlihat kurang mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Singapura (perkapalan) Filipina (awak kapal). Demikian halnya dengan perhubungan udara, walaupun di dalam negeri telah memperlihatkan banyak kemajuan. Pemanfaatan telekomunikasi cukup meluas, tetapi penelitian dan pemanfaatan *hard minerals* dari dasar laut belum banyak terlihat, walaupun di beberapa tempat di sepanjang pantai sudah ada kegiatan-kegiatan penambangan timah dan pasir. Pemanfaatan energi dari laut, termasuk geothermal, ruang laut serta mineral-mineral lainnya masih belum intensif dan masih banyak memerlukan penelitian-penelitian.

*Ketiga* adalah masalah pemeliharaan lingkungan laut. Kerusakan lingkungan laut serta *coastal zone management* serta pengelolaan pantai dan pesisir masih banyak yang perlu diperhatikan dan dikerjakan. Sumber-sumber perikanan di beberapa tempat, khususnya di bagian barat Perairan Nusantara Indonesia sudah *over exploited* dan dalam beberapa hal malah menjadi tidak berkelanjutan karena penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang tidak wajar seperti menggunakan sianida dan bahan peledak serta racun (*potasium*) masih

banyak terjadi, yang juga dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting, dan banyaknya *illegal unregulated and unreported fishing* (IUU).

Selain itu, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan *mangrove* serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, perumahan, serta industri dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata.

Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut

minyak serta kegiatan pertambangan. Kondisi diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.

Instalasi-instalasi penambangan migas di laut serta pipa-pipa migas di dasar laut juga berpotensi menimbulkan pencemaran laut, walaupun teknologi pencegahannya dewasa ini sudah sangat maju. Kerusakan-kerusakan lingkungan laut juga bisa terjadi karena kerusakan hutan-hutan di sepanjang pantai yang dapat merusak daerah pembijahan (*spawning*) perikanan, serta pengaturan kehutanan dan kawasan pantai atau pesisir yang tidak berkelanjutan.

Perlu dicatat bahwa Indonesia telah menerima dan meratifikasi Konvensi HUKLA 1982 dan konvensi tersebut diwajibkan semua negara untuk melindungi lingkungan lautnya (pasal 192) dan bekerjasama dengan negara-negara tetangganya untuk melindungi lingkungan laut (pasal 197).

*Keempat* adalah masalah keamanan laut. Masalah penegakan dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan Indonesia dan ZEE) yang luasnya hampir 6 juta Km<sup>2</sup> tersebut atau tiga kali dari luas darat masih sangat memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan ALKI-ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerjasama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Di samping itu, usaha-usaha

meningkatkan *monitoring, control, surveillance*, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.

Beberapa contoh dari kurangnya keamanan laut di Indonesia sehingga menimbulkan pencurian ikan (*illegal fishing*), baik oleh kapal-kapal domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan sekitar 1- 1,5 juta ton per tahun atau senilai sekitar US\$ 2 milyar. Dari berbagai kasus *illegal fishing* selama ini, modus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun ekspedisi asing antara lain pelanggaran tanpa dokumen izin, menyalahi daerah tangkapan (*fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, pemindahan hasil tangkapan (*transshipment*) di laut, pemalsuan dokumen dan manipulasi informasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut.

*Kelima* adalah masalah pemanfaatan peranan nelayan dan pelaut Indonesia. Nelayan Indonesia sangat besar jumlahnya dan jika dihitung dengan seluruh keluarganya dan *multiplier effects-nya* akan dapat mencakup jumlah sekitar 20 juta manusia di seluruh Indonesia yang peranannya dalam pembangunan ekonomi cukup besar tetapi dalam kehidupannya termasuk masyarakat yang terbelakang, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu perlu benar lebih meningkatkan kemampuan mereka bukan saja dalam kemampuan menangkap ikan, memproses dan memasarkannya, tetapi juga dalam memelihara kelestarian lingkungan laut dan keamanan pada umumnya.

Potensi ini masih belum banyak yang digali. Demikian pula halnya dengan tenaga-tenaga pelaut Indonesia yang merupakan sumber yang sangat potensial

bagi pembangunan Indonesia. Peranan pelaut Indonesia dalam negara maritim Indonesia ini khususnya di bidang perkapalan nasional dan internasional, masih banyak dapat dan perlu dikembangkan, apalagi mengingat semakin meningkatnya peranan kapal-kapal berbendera asing dalam transportasi nasional dan internasional barang-barang Indonesia. Untuk itu maka kualitas pelaut-pelaut Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan *IMO (International Marine Organization)*.

*Keenam* adalah masalah isu-isu baru kelautan. Sesuai dengan perkembangan dunia yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, maka berbagai isu baru pun bermunculan di bidang kelautan, baik di dalam negeri maupun di kawasan, ataupun di dunia internasional yang cepat atau lambat dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan laut termasuk di Indonesia. Beberapa organisasi internasional sudah mulai menaruh perhatian terhadap masalah-masalah ini, baik PBB maupun organisasi lainnya seperti APEC, dan lain-lain. Di antara masalah-masalah baru yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Masalah *Aquaculture* dan *Fishculture*,
- b. Meningkatnya usaha-usaha Bio-prospecting untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru dari kehidupan di laut, terutama untuk pengobatan dan makanan,
- c. Perubahan iklim dan naiknya permukaan laut yang semakin cepat dan dapat mengancam daerah-daerah pantai,
- d. Meningkatnya ilmu pengetahuan tentang valuation of coastal and ocean economic,

- m. Meningkatnya Marine Tourism khususnya yang berkaitan dengan eco tourism,
- n. Meningkatnya perhatian untuk mencari sumber-sumber energi baru dari laut selain migas, baik melalui arus, ombak, temprature differentials, geothermal, dan lain-lain,
- o. Semakin banyaknya offshore installations dan struktur di laut yang telah mendekati umur ekonomis sehingga memerlukan proses decommissioning dan karenanya perlu membongkar, memindahkan, dan meretrofit decommissioned tetapi menjadi sumber-sumber ekonomi baru,
- p. Semakin banyaknya sub-marine cables dan pipelines di dasar laut,
- q. Meningkatnya dan munculnya isu-isu baru seperti *people smuggling*, *illegal immigrants*, *transnational crimes*, bajak laut dan perompakan laut, pencurian ikan, polusi dari darat, coastal mining, perikanan yang semakin tidak berkelanjutan dan IUU, dan
- r. Meningkatnya percaturan politik dan strategi kelautan, baik regional maupun internasional, sejalan dengan meningkatnya peranan laut bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk bagi Indonesia yang mempunyai posisi geo-maritime strategis yang sangat vital antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di tengah-tengah perimbangan dan hubungan kekuatan di dunia, khususnya di Pasifik Barat, Asia Selatan dan Timur Tengah yang dewasa ini sedang bergerak cepat.

*Ketujuh* adalah pengembangan institusi atau kelembagaan yang efektif.

Pada zaman Presiden Soekarno, pemerintah telah mendeklarasikan prinsip-

prinsip Kesatuan Kewilayahan Nusantara Indonesia melalui 'Deklarasi Djuanda'. Pada zaman Presiden Soeharto, pemerintah telah memperjuangkan pengakuan kawasan dan dunia internasional terhadap berbagai konsepsi kelautan Indonesia, termasuk kesatuan nusantara tersebut. Pada zaman Presiden Habibie, pemerintah telah mendeklasikan 'Deklarasi Bunaken' yang menyatakan bahwa seluruh kawasan Indonesia dengan segala macam jenis lautnya yang begitu luas, seperti suatu 'benua maritim', perlu dan akan digunakan sebagai satu kesatuan kekayaan alam untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Di zaman Presiden Abdurrachman Wahid dan Presiden Megawati telah didirikan Departemen Ekplorasi Laut (Kelautan dan Perikanan) serta mengaktifkan Dewan Maritim Indonesia. Dan pada tahun 2002 Departemen Ekplorasi Laut di gantikan menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan yang kemudian menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 hingga sekarang.

Berbagai hambatan telah ditemukan dan sebagian diantaranya masih tetap berlanjut. Diantara hambatan-hambatan tersebut adalah susahnya mengembangkan koordinasi lintas sektoral yang efektif dan kadang-kadang masih tumpang tindih antara berbagai kegiatan kelautan. Di samping itu kurangnya atau sulitnya mengembangkan kemampuan faktor 5 M (*Man, Money, Material, Management, Methodology*) untuk keperluan pemanfaatan laut, penegakan hukum dan kedaulatan di laut telah memperberat kesulitan tersebut.

Walaupun pemerintah semakin hari semakin memperlihatkan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kelautan, namun dalam kenyataannya banyak masalah-masalah lama yang belum tertangani sedangkan masalah-masalah

baru mulai bermunculan. Tidak mudah kiranya mengembangkan suatu kelembagaan yang mapan dan efektif untuk dapat menangani seluruh persoalan kelautan Indonesia yang semakin ruwet dan beraneka ragam itu. Diperlukan memang perhatian yang semakin besar dan sungguh-sungguh dari lapisan masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengelola dan mendayagunakan secara berkelanjutan seluruh laut Indonesia dan potensinya.

### **3. Kebijakan Indonesia dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan**

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.*<sup>34</sup>

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan

---

<sup>34</sup> [www.dkp.go.id/tingkatkan/pembangunan/kelautan/dan/perikanan/dkp/susun/rpjm2010-2014/](http://www.dkp.go.id/tingkatkan/pembangunan/kelautan/dan/perikanan/dkp/susun/rpjm2010-2014/). Diakses 28 November 2010.

membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.
- 2) Misi untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 3) Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah:
  - Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
  - Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
  - Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
  - Memperluas akses pasar domestik dan internasional.
- 4) Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:
  - a. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara terintegrasi:
    - Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta di implementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.

- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
- SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

b. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan:

- Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
- Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
- Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
- Indonesia bebas *Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan:

- Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

- Seluruh sentral produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
- Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

d. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:

- Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
- Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:

1. Pro poor

Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Pro job

Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. Pro growth

Pendekatan Pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelutan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

#### 4. Pro sustainability

Pendekatan Pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penulis menjelaskan bahwa kondisi umum di atas merupakan upaya-upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, walaupun terdapat berbagai macam masalah namun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengambil langkah kebijakan nasional melalui UU No.17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan misinya yakni *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Serta menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan 2010-2014 yang kini menjadi acuan kerja oleh sektor ini kedepan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Buku Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kelautan 2010-2014.

## C. Kerjasama Internasional

### 1. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan Politik Luar Negeri telah di atur dalam Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang Ketentuan Umum yang berbunyi bahwa *politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.*<sup>36</sup>

Dalam hal ini, kebijakan merupakan sikap atau tindakan dari politik luar negeri itu sendiri dalam menghadapi berbagai masalah internasional guna mencapai tujuan nasional atau kepentingan nasional.

Salah satu pencapaian kebijakan politik luar negeri dalam hubungan internasional yakni dengan melakukan perjanjian internasional. Instrument tersebut merupakan kebijakan nasional Indonesia untuk mencapai kepentingan bangsa Indonesia. Adapun pengertian Perjanjian Internasional telah di atur dalam Undang-undang No.24 Tahun 2000 pada Bab I Pasal I Ayat I bahwa *perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.*

Dan juga telah di atur di atas tentang Undang-undang Pembuatan Perjanjian Internasional di Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi *Pemerintah Republik*

---

<sup>36</sup> [www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU%20No.37%20Tahun%201999.pdf](http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU%20No.37%20Tahun%201999.pdf). Diakses 13 Oktober 2010.

*Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Dan Ayat 2 yang berbunyi, Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.<sup>37</sup>*

Mengacu pada landasan hukum diatas, dalam hal ini Indonesia memiliki hak untuk melakukan perjanjian internasional atau kerjasama internasional dengan siapapun. Salah satu kepentingan Indonesia dalam rancangan pembangunan nasional yakni melalui pemanfaatan pada sektor kelautan dan perikanan, karena sektor tersebut merupakan peluang yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi bagi Indonesia jika dilihat dari potensi sumberdaya laut yang ada.

Melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) mengisyaratkan bahwa Indonesia sampai dengan tahun 2025 haruslah menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.<sup>38</sup>

Menurut salah satu staff Kementerian Kelautan dan Perikanan di Biro Pusat Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga baru-baru ini mengungkapkan

---

<sup>37</sup> "Perjanjian Internasional", [http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU\\_20\\_No.24\\_Tahun\\_2000.](http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU_20_No.24_Tahun_2000.), Diakses 25 Oktober 2010.

<sup>38</sup> "UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP"  
<http://www.malukuprov.go.id/index.php/berita/67-seputar-maluku/101-sail-banda-2010.>, Diakses 11 Oktober 2010.

*bahwa dalam mencapai misi dari kebijakan kelautan Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang hingga tahun 2025, Pemerintah Indonesia akan fokus terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di bagian Indonesia Timur dikarenakan bagian timur Indonesia mempunyai kekayaan laut yang lebih banyak namun belum dikelola secara optimal jika dibandingkan dengan bagian barat Indonesia dan kurang meratanya pembangunan ekonomi antara Indonesia bagian barat dan bagian timur yang kini masih tertinggal jauh.<sup>39</sup>*

Kerjasama Internasional merupakan salah satu instrument politik dari landasan di atas dan juga misi utama dari kebijakan kelautan Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang ada di Indonesia bagian timur yang kini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Di dalam penulisan karya ilmiah ini, selanjutnya penulis akan membahas kerjasama internasional antara Indonesia dan Australia dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang ada, baik dari perkembangan kerjasama Indonesia dan Australia sejak awal bekerjasama hingga meningkatkan kerjasama dalam memanfaatkan potensi laut yang ada di Maluku akhir ini, umumnya pada bagian Indonesia Timur yang kini menjadi fokus utama bagi pembangunan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan salah satu staff Kementerian Kelautan dan Perikanan di Biro Kerjasama Internasional di Jakarta, 16 November 2010.

## 2. Perkembangan Kerjasama Indonesia dan Australia di Bidang Kelautan dan Perikanan

*Pertama, Working Group Meeting on Marine Affairs and Fisheries (1<sup>th</sup> WGMAF Meeting)* yakni pertemuan pertama antara Indonesia dengan Australia dalam membangun kerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara kedua negara yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Abdurrachman Wahid pada pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, H.E. John Howard yang berlangsung tahun 2001.<sup>40</sup> Kedua belah pihak pada pertemuan tersebut menginstruksikan dibentuknya sebuah Working Group di bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Australia, yang terdiri dari:

- a. Sub Working Group bidang IUU Fishing
- b. Sub Working Group bidang MoU Box
- c. Sub Working Group bidang Manajemen Perikanan
- d. Sub Working Group bidang Kemitraan dan Kerjasama

Semenjak saat itu dan untuk seterusnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Australia telah melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk membahas isu-isu kelautan dan perikanan di antara kedua negara.

*Kedua*, dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, berdasarkan MoU Box 1974, para nelayan tradisional Indonesia masih memiliki akses penangkapan di zona khusus. Kawasan yang diperbolehkan Australia bagi para

---

<sup>40</sup> Sumber Data : Penelitian Penulis di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Oktober 2010.

nelayan tradisional Indonesia adalah Kepulauan Karang Scott, Seringapatam, Pulau Browse, Kepulauan Karang Ashmore, Pulau Cartier dan perairan sekitarnya.<sup>41</sup>

*Ketiga*, pada tahun 2007 Ditjen P2DSKP berhasil menyelenggarakan *Senior Official Meeting (SOM)* dan *Regional Ministering Meeting (RMM) on Promoting Responsible Fishing Practice In the Region*, di Bali. Kegiatan yang dihadiri 10 negara, dari 13 negara yang diundang ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari SOM pertama di Jakarta dan kedua yang berlangsung di Canberra. Kegiatan SOM dan RMM ini merupakan inisiatif bersama antara Indonesia dan Australia. Targetnya antara lain untuk mewujudkan praktek penangkapan ikan yang bertanggungjawab, termasuk di dalamnya, penanggulangan *IUU Fishing* khususnya di wilayah Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Arafura. Melalui kerjasama regional ini diharapkan dapat dihasilkan suatu kesepakatan berupa aksi bersama di kawasan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

*Keempat*, Kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan dengan menyepakati kesepakatan dalam *The 6<sup>th</sup> Working Group on Marine and Fisheries (6<sup>th</sup> WGMAF Meeting)* yang berlangsung pada tanggal 19-20 Maret 2009 di Nusa Dua, Bali. Hasil pertemuan antara lain menyepakati hal-hal berikut:<sup>43</sup>

a. Bidang Penanggulangan Illegal Fishing :

---

<sup>41</sup> Sulaiman Fadh Prince, dalam skripsi tentang: *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam mengatasi Praktek Illegal fishing Oleh Kapal Asing, 2009*. Hal.105.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1114/indonesiadanaustralia/tingkatkan-kerjasama-kelautan-dan-perikanan/>. Diakses 13 Oktober 2010.

- ◆ Kedua negara memandang positif program kampanye informasi kepada masyarakat umum atau *program Public Information Campaign (PIC)* dan sepakat melimpahkan pelaksanaan kegiatan PIC di lapangan kepada petugas penyuluh perikanan Indonesia.
- ◆ Sepakat untuk mendorong implementasi agenda *Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing in the region.*
- ◆ Sepakat melanjutkan kerjasama penanganan kapal dan nelayan yang terindikasi melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan perbatasan kedua negara.
- ◆ Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan finalisasi studi bersama terkait dengan penangkapan ikan ilegal di perairan yang menjadi kepentingan bersama antara RI-Australia (*Joint Australian-Indonesia study on illegal foreign fishing in waters of mutual interest between Australia and Indonesia*).
- ◆ Patroli terkoordinasi di perbatasan ZEE yang merupakan kerjasama antara Indonesia-Australia berdampak positif. Terkait dengan hal tersebut kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui:
  - ★ Peningkatan patroli terkoordinasi;
  - ★ Pertukaran data/informasi;
  - ★ Kunjungan timbal balik antara kapal patroli perikanan Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia;

- ★ Peningkatan kapasitas SDM pengawasan perikanan melalui pelatihan;
- ★ Dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia.
- ★ Kedua negara sepakat bekerjasama dalam penanganan kapal “induk” (*mother ship*) yang dioperasikan untuk mendukung kapal perikanan illegal yang beroperasi di perairan sepanjang perbatasan kedua negara.

b. Bidang MoU Box:

- ◆ Indonesia mengusulkan beberapa program kerjasama terkait dengan Joint Survey dan riset didaerah MoU Box, Kelestarian sumber daya natural di daerah MoU Box terkait dengan kesejahteraan nelayan tradisional serta motivasi para nelayan tradisional di menangkap di wilayah MoU Box. Indonesia dan Australia sepakat untuk membentuk tim kerja bersama guna membahas elemen-elemen didalam kerjasama MoU Box.

c. Bidang Manajemen Perikanan:

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan perikanan, kedua belah pihak sepakat untuk:

- ◆ Mengembangkan sistem pendataan dan informasi terkait dengan perikanan tuna dan kakap merah di wilayah Indonesia Timur, melalui

pengembangan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.

- ◆ Pengembangan metode dan data base melalui pelaksanaan log book dan program observer untuk perikanan tuna dan kakap merah.
- ◆ Mengadakan lokakarya nasional untuk perikanan kakap merah di wilayah perbatasan antara Australia dan Indonesia.
- ◆ Mengadakan lokakarya bagi para peneliti perikanan yang meliputi monitoring dan pelaporan perikanan tuna.

d. Bidang Kemitraan dan Kerjasama:

- ◆ Kedua pihak sepakat bahwa program beasiswa ADS (*Australian Development Scholarship*) bagi staf Departemen Kelautan dan Perikanan untuk tetap dilanjutkan.
- ◆ Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani MoU terkait dengan kerjasama Sister University antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan Australian Maritime College, Tasmania sebagai dasar dari kerjasama tersebut.
- ◆ Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama di bidang karantina ikan, terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk staf karantina ikan Indonesia dalam bentuk training di institusi karantina di Australia.

*Kelima*, kerjasama Indonesia dan Australia dalam sektor kelautan dan perikanan juga ditingkatkan kembali dalam kunjungan delegasi Indonesia ke Australia yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada tanggal 17 Juli 2009. Kerjasama Departemen Kelautan dan

Perikanan Indonesia dan Ministry of Home Affairs Australia dalam hal ini telah menandatangani *Letter of Intent On Border Patrol* untuk mempererat kerjasama antar kedua negara dalam penanggulangan *illegal fishing* yang marak terjadi di lepas perairan bagian utara Australia dan selatan Indonesia yakni di laut Arafura dan laut Timor.<sup>44</sup>

Sepanjang tahun 2009, Indonesia dan Australia juga telah melaksanakan beberapa kali pertemuan melalui forum diskusi dan sosialisasi bersama untuk meningkatkan kesadaran untuk mendorong perikanan berkelanjutan dan mencegah penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan Australia. Telah dilaksanakan pula beberapa pembahasan tentang peta batas maritim Indonesia-Australia untuk Pengaturan Penangkapan Sumberdaya Hayati di Samudera Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafura. Diharapkan peta batas maritim Indonesia-Australia tersebut dapat segera disepakati.

*Keenam*, pertemuan antara Duta Besar Australia, Bill Farmer dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2010 dengan menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia dan Australia juga menetapkan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pemasaran hasil perikanan dalam kerangka Asean-Australia-New Zealand FTA, identifikasi pengelolaan ekosistem Laut Arafura melalui ATSEF (Australia Timor Sea Forum), dan

---

<sup>44</sup> <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1452/indonesia-australia-tingkatkan-kerjasama-perangi-iuu-fishing/>. Diakses 13 Oktober 2010.

penguatan kerjasama antar lembaga melalui forum *Coral Triangle Initiative* (CTI).<sup>45</sup>

*Ketujuh*, kegiatan Sail Banda 2010, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2010 di Hotel Aston Natsepa Ambon, Maluku yakni merupakan pertemuan dalam kerangka kerjasama Indonesia-Australia mengisi rangkaian Sail Banda dan juga merupakan pertemuan *The 7<sup>th</sup> Working Group on Marine and Fisheries (7<sup>th</sup> WGMAF Meeting)* antara Indonesia dan Australia. Pertemuan tersebut guna meningkatkan kerjasama antara kedua negara di bidang kelautan dan perikanan serta fokus terhadap kerjasama dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.<sup>46</sup>

Demikian paparan tentang dinamika perkembangan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang kelautan dan perikanan dari awal pembentukan kerjasama hingga terakhir dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan potensi laut di Maluku yang menjadi obyek penelitian penulis dan akan dibahas lebih dalam lagi pada bab 3 mengenai bentuk-bentuk peningkatan kerjasama yang telah di sepakati serta menjelaskan kepentingan nasional Indonesia ingin bekerjasama dengan Australia.

---

<sup>45</sup> [http://www.dkp.go.id/archives/c/34/2176/indonesia dan australia/bahas-kerjasama-perikanan](http://www.dkp.go.id/archives/c/34/2176/indonesia%20dan%20australia/bahas-kerjasama-perikanan). Diakses 13 Oktober 2010.

<sup>46</sup> <http://www.malukuprov.go.id/index.php/berita/67seputar-maluku/101-sail-banda-2010>. Diakses 21 Oktober 2010.